

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Pemprov DKI Coret 1,1 Juta Data Warga Penerima Bansos

◆ Punya Mobil dan Pindah dari Jakarta

JAKARTA (Poskota)

- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencoret sebanyak 1,1 juta warganya yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Keseluruhannya dinilai tidak lagi masuk ke dalam kategori masyarakat ekonomi lemah atau sudah pindah dari Ibu Kota.

"Ada 1,1 juta kemarin sudah kami delete dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan. Kan dia punya mobil dan lainnya," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono,

Rabu (22/2).

Dikatakan Heru, sebanyak 1,1 juta penduduk tersebut juga memiliki aset berupa rumah sehingga tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Bahkan, juga ditemukan data sekitar 200 ribu yang akan dihapus dari penerima bantuan sosial karena sudah keluar DKI Jakarta.

"Hari ini pepadanan itu bisa bertambah sekitar 200 ribu tapi nanti kami cek lagi memang penduduknya sudah tidak aktif di DKI," imbuh Heru.

Sementara itu, Di-

rektur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, jumlah warga yang dihapus itu sebelumnya penerima bantuan sosial di DKI yang tingkat sosial ekonominya sudah meningkat misalnya memiliki tanah, mobil, hingga saham.

Ia pun mendukung langkah Heru melakukan akurasi data dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di DKI dan pelayanan publik. "Itu nanti kami akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pepadanan data," katanya.

Evaluasi Data Penerimaan

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad meminta Pemprov DKI serius dan memberi perhatian lebih terhadap perbaikan data penerima bantuan sosial. "Saya mengapresiasi Pak Pj Gubernur punya fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui pepadanan dan evaluasi data seperti dsta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan carik Jakarta," kata Idris.

"Hal ini merupakan

persoalan mendasar yang perlu dilakukan evaluasi. Data yang banyak tumpang tindih selama ini adalah PKH dan BPNT yang berasal dari Pemerintah Pusat," sambungnya.

Legislator Kebon Sirih ini menekankan bahwa keadilan menjadi kunci penanganan kemiskinan ekstrem. "Kalau kita bisa menjaga alokasi bantuan sosial kita merata, adil dan tepat sasaran, Insyaallah target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jakarta dapat tercapai," tutup Idris. **(Aldi/Ifn)**